

Menelisik Makna “Kritis” dalam Geografi Kritis

Rangga Kala Mahaswa^{1,2*}, Luthfi Baihaqi Riziq¹, Al Irfani Thariq Azhar¹

¹Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Pusat Studi Antroposen, Yogyakarta, Indonesia

Email koresponden: mahaswa@ugm.ac.id

Submitted: 2024-09-30 Revisions: 2025-02-17 Accepted: 2025-02-17 Published: 2025-02-18

©2025 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

©2025 by the authors. Majalah Geografi Indonesia.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Abstrak Dalam perkembangannya, geografi manusia menginkorporasikan isu-isu politis sebagai bentuk pergerakan oposisional terhadap prevalensi masalah sosial, seperti ketimpangan, rasisme, gender, dan problem lingkungan. Peradikalan geografi manusia dalam tataran metodis terjadi melalui trajektori pemikiran Marxisme yang dimajukan oleh David Harvey. Pembacaan Harvey terhadap geografi mendekatkan diri dengan Marx dan pemikir-pemikir setelahnya, seperti Henri Lefebvre, untuk mencari aspek keruangan dari dominasi kapitalisme. Geografi kritis kemudian menambahkan berbagai gaya pemikiran—di antaranya, feminisme, pascakolonialisme, dan pascastrukturalisme—dalam upaya membongkar, mendekonstruksi, dan mengubah berbagai bentuk penindasan. Keterlibatan tradisi selain Marxisme menimbulkan diskursus yang terlampaui luas yang semuanya kini disatukan dalam term payung “geografi kritis”. Kondisi ilmu geografi dewasa ini menuntut pertanyaan mengenai delineasi geografi kritis di samping geografi adjektival lainnya (“geografi fisik”, “geografi sosial”, “geografi regional”). Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut melalui beberapa pembagian bahasan sebagai berikut. Pertama, tulisan ini akan melacak sejarah perkembangan geografi kritis dari perkembangan geografi sebelumnya yang memantik kehadiran metode radikal. Kemudian, geografi kritis akan ditampilkan secara kontekstual dalam perkembangannya sebagai geografi yang inklusif terhadap berbagai diskursus filosofis. Kedua, tulisan ini akan menjabarkan secara kritis konsep-konsep yang esensial di dalam geografi kritis bersama dengan, ketiga, metodologi yang menjadi benang merah antara berbagai pendekatan dan gaya dalam geografi kritis. Keempat, tulisan ini akan melihat cara kerja geografi kritis dalam literatur yang telah tersedia untuk melihat persimpangan geografi kritis dengan berbagai bidang ilmu dan masalah, seperti hukum, aktivisme sosial, dan mitigasi bencana. Terakhir, tulisan ini ditutup dengan kajian reflektif mengenai makna term “kritis” dan penggunaannya dalam diskursus geografi kritis serta membayangkan ulang geografi di Indonesia dalam bentuk yang memungkinkan interaksi secara intens dengan bidang-bidang sosial humaniora. Hal ini akan menggambarkan garis besar geografi yang bersifat multidisipliner, termasuk mengambil wawasan dari filsafat.

Kata kunci: geografi kritis, kritisisme, pascamodernisme, metodologi baru.

Abstract This paper explores the progress of human geography's incorporation of political issues as a form of oppositional movement against prevalent social problems, such as inequality, racism, gender, and environmental issues. The radicalisation of human geography on a methodological level emerged through the trajectory of Marxist thought, as advanced by David Harvey. Harvey's interpretation of geography aligns with Marx and later thinkers, such as Henri Lefebvre, to uncover the spatial dimensions of capitalist domination. Critical geography then integrated various intellectual approaches—feminism, postcolonialism, and poststructuralism—to deconstruct and transform various forms of oppression. The inclusion of traditions beyond Marxism has broadened the discourse, all of which now fall under the umbrella term “critical geography.” The current state of geography raises questions regarding the delineation of critical geography alongside other adjectival forms of geography (“physical geography”, “social geography”, “regional geography”). This study addresses these questions in several sections. First, it traces the historical development of critical geography from earlier geographic traditions, which sparked the emergence of radical methodologies. It also contextualises critical geography as an inclusive field that embraces various philosophical discourses. Second, the paper critically examines essential concepts within critical geography, followed by, third, an exploration of the methodologies that link diverse approaches and styles in critical geography. Fourth, it analyses the application of critical geography in the existing literature, highlighting its intersections with various fields and issues such as law, social activism, and disaster mitigation. Finally, the paper concludes with a reflective analysis of the term “critical” and its usage in the discourse of critical geography, reimagining geography in Indonesia in a way that allows for intensive interaction with the social sciences and humanities. This reflection outlines the multidisciplinary of geography by drawing insights from philosophy.

Keywords: Geography, Critical Approach, Postmodernism, New Methodology.

PENDAHULUAN

Gelombang pendekatan geografi kritis telah menjadi titik sentral wacana baru di Indonesia. Istilah geografi kritis atau *critical geography* yang dipopulerkan oleh tradisi Anglo-Amerika sekitar tahun 1970-an telah mengubah lanskap

berpikir para geograf(er)¹ tentang dunia dan berbagai konsekuensi penelitian geografi di masa depan. Para geograf

¹ Artikel ini menggunakan pilihan diksi ‘geograf’ daripada ‘geografer’ untuk menyesuaikan dengan KBBI VI dan lembaga Ikatan Geograf Indonesia. Keduanya merujuk kepada ahli geografi.

menyebut tradisi geografi kritis telah melahirkan banyak geografer radikal. *Radikal* bermakna *mengakar* atau *mengkritis* sesuatu yang telah mapan, tetapi terlupakan oleh dominasi gerak penelitian geografi pada umumnya. Gelombang kedua geografi kritis, pasca 1980-an, terjadi ketika berbagai pendekatan non-geografi (seni, sosial humaniora, feminisme, humanisme, dan filsafat) memberikan kontribusi konseptual secara signifikan, terutama komitmen epistemik untuk berani keluar dari ‘zona nyaman’ atas keamanan disiplin geografi pada umumnya. Melihat situasi tersebut, artikel ini kemudian mencoba untuk memetakan ulang dua tren (pengarusutamaan wacana) yang sedang terjadi di Indonesia, yakni i) lahirnya semangat baru dalam tradisi riset multidisipliner dan ii) berkembangnya pendekatan alternatif di bidang geografi, seperti filsafat geografi dan geografi kritis. Dua kondisi inilah yang menjadi dasar penelitian ini.

Pertama, riset-riset multidisipliner di Indonesia telah mengalami perubahan orientasi kepentingan kolektif. Hal ini diawali dengan munculnya keterbukaan ruang-ruang dialog lintas disiplin baru sehingga melahirkan temuan-temuan ‘tak terduga’ namun cukup berpengaruh. Tidak hanya itu, orientasi ini mengemukakan adanya kompleksitas permasalahan saintifik yang ditemukan sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif serta mendalam melalui riset inter-/intra-/multi-disipliner bahkan meta-disipliner (Mahaswa, 2016; Poespowardojo & Seran, 2015). Kedua, kajian filsafat geografi telah mendapatkan perhatian tersendiri baik di bidang ilmu geografi maupun pendidikan geografi. Jurnal *Majalah Geografi Indonesia* (MGI) menjadi salah satu jurnal bereputasi terakreditasi nasional yang dikelola oleh Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) setidaknya telah menerbitkan tiga artikel kunci yang membahas tentang posisi filsafat dan geografi sebagai tawaran diskursus terbuka di Indonesia. Diawali dengan karya Akxa *et al.* (2019) yang membahas posisi geografi dalam filsafat ilmu, lalu dilanjutkan oleh para koleganya; Sejati *et al.* (2022) yang mempertanyakan ‘tantangan filsafat geografi terkini’ serta Ikhsan *et al.* (2024) dengan tawarannya untuk membangun ‘paradigma filsafat geografi kontemporer’.

Selain filsafat geografi, pendekatan geografi kritis juga mulai mendapatkan perhatian dari beberapa peneliti di Indonesia, antara lain: Nalle (2021) dan Nalle & Moeliono (2023) yang berusaha mengintegrasikan teori geografi kritis, terutama dari Henri Lefebvre (1901-1991) dan David Harvey, dengan ilmu hukum—yang disebut pendekatan geografi hukum kritis; Hexagraha (2018) dengan cermat memetakan telaah ko-produksi kota melalui telaah geografi kritis; pendekatan spasialitas ‘kritis’ dalam geografi manusia (Hastuti, 2007, 2009; Lasaiba, 2023; Taher, 2017); serta pendekatan geografi kritis sebagai kerangka kontestasi ruang sosial dan gender (Udasmoro & Anwar, 2019). Melihat antusiasme ragam riset geografi kritis yang sedang berkembang beberapa tahun terakhir, lantas mendorong kami untuk melakukan kajian ulang secara kritis dari sudut pandang meta-filsafat untuk meninjau ulang wacana geografi kritis dan filsafat geografi yang sedang berkembang di Indonesia. Kendati demikian, kami melakukan dua tahapan sebagai rumusan pertanyaan penelitian ini, antara lain: Pertama, mendefinisikan makna ‘kritis’ dalam geografi kritis sebagai kontribusi dalam gelombang wacana baru geografi kritis di Indonesia. Kedua, menawarkan refleksi kritis atas pembacaan umum filsafat geografi di Indonesia melalui sudut pandang meta-filsafat.

Artikel ini terbagi menjadi empat pembahasan. Bagian pertama tentang sejarah perkembangan geografi kritis dari sudut pandang geografi. Bagian kedua menjelaskan secara mendalam konsep-konsep yang esensial dalam geografi kritis. Bagian ketiga memuat metodologi, pendekatan, gaya selingkung, serta persimpangan geografi kritis dengan bidang ilmu lainnya. Terakhir, tulisan ini memunculkan pembahasan refleksi tentang term ‘kritis’ sekaligus konsekuensi pilihan term ‘kritis’ dalam implementasi wacana geografi sekaligus membayangkan ulang implementasi geografi kritis lintas keilmuan, termasuk filsafat geografi di Indonesia. Tujuannya, tidak lain dan bukan agar gerak dialektis multidisipliner senantiasa terjaga, termasuk mengambil wawasan dari sudut pandang filsafat.

METODE PENELITIAN

Selayaknya penelitian filsafat pada umumnya, kami menggunakan pendekatan filosofis untuk melakukan kajian teks atau wacana yang ditemui secara kritis dan reflektif (Daly, 2010). Metode penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan menggunakan kajian literatur (studi pustaka) untuk menghasilkan informasi deskriptif (Flick, 2014). Kajian ini membahas mengenai sejarah geografi secara umum dan geografi kritis secara khusus, sejarah konseptual geografi kritis, geografi sebagai ilmu yang ditinjau dari sudut pandang filsafat, dan posisi geografi sebagai bidang studi di lanskap intelektual secara luas dan di Indonesia secara spesifik. Sumber studi pustaka yang digunakan adalah literatur digital maupun cetak yang dapat ditemukan melalui buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dalam pembahasannya tentang wacana umum geografi kritis dan filsafat geografi. Basis data yang digunakan adalah jurnal terindeks *Scopus*, artikel yang tersedia di *Google Scholar* dan *JSTOR*, dan buku dari situs daring. Kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran luas mengenai riset sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut (Snyder, 2019).

Tahapan penelitian adalah sebagai berikut. Setelah pengumpulan data, data ditriangulasi, dianalisis, direfleksikan, dan disusun dalam bentuk penulisan. Pertama, pengumpulan data mencakup literatur primer dan sekunder (Mwita, 2022) yang relevan dengan geografi kritis dan filsafat geografi. Literatur primer meliputi buku klasik, artikel jurnal seminal, dan karya akademik yang menjadi dasar pengembangan wacana geografi kritis. Literatur sekunder mencakup karya-karya yang menginterpretasi, mengulas, dan mengkritik pemahaman tentang konteks perkembangan geografi kritis beserta teori-teorinya. Proses *concept-centric literature search* (Chigbu *et al.*, 2023) ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci berupa “*critical geography*”, “*philosophy of geography*”, “*geografi Indonesia*”, dan sejenisnya untuk mencari literatur. Kata kunci diterapkan secara fleksibel untuk memastikan cakupan pencarian yang luas.

Kemudian, data diolah dengan mengorganisasi literatur ke dalam kategori tematik sesuai tujuan penelitian di atas (Kulczak-Dawkins *et al.*, 2018). Tema-tema yang diidentifikasi meliputi sejarah geografi, konsep-konsep dasar dalam geografi kritis, dan konteks geografi manusia dan geografi kritis dari peneliti Indonesia. Setiap literatur ditinjau untuk dinilai relevansinya kemudian dirangkum ke dalam tabel analisis yang membantu memahami kondisi latar belakang riset (Dawadi, 2020). Triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan validitas hasil pengolahan. Triangulasi penelitian ini

melibatkan sumber data (perbandingan literatur), diskusi antarpeneliti untuk mengurangi bias interpretasi terhadap data, dan teori (perbandingan perspektif) (Donkoh & Mensah, 2023).

Analisis data dilakukan dengan metode interpretatif untuk memahami cara konsep-konsep geografi kritis berkembang dan diterapkan. Proses analisis melibatkan pembacaan mendalam (*close reading*), identifikasi pola, dan evaluasi terhadap keterkaitan antarkonsep (Ellermann, 2024). Analisis pula dilakukan untuk mengeksplorasi perbedaan geografi kritis dalam konteks global dan lokal. Pendekatan meta-filsafat (*metaphilosophy*) menjadi tambahan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menginvestigasi suatu konsep, prinsip, dan metode berfilsafat (J. Schmid, 2022). Pada konteks penelitian ini, meta-filsafat ditempatkan sebagai cara untuk membaca pengembangan filsafat geografi di Indonesia secara lebih terbuka.

Setelah analisis, sintesis data dilakukan untuk menghasilkan narasi komprehensif yang menjelaskan sejarah dan posisi geografi kritis. Sintesis data mencakup penggabungan temuan dari literatur, perumusan konsep-konsep esensial, dan penyajian kesimpulan sementara. Proses sintesis dilakukan dengan menyeimbangkan data deskriptif dengan interpretasi kritis (Schryen, 2015). Tujuan proses ini adalah memberikan kontribusi teoretis terhadap wacana geografi kritis dan filsafat geografi di Indonesia. Tema yang menuntun selama proses penelitian adalah upaya eksplorasi filsafat geografi yang telah diterbitkan oleh Majalah Geografi Indonesia. Dalam hal itu, penelitian ini berusaha untuk berposisi sebagai riset lanjutan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengenai filsafat geografi di Indonesia, terutama dari Aksa *et al.* (2019), Sejati *et al.* (2022), dan Ikhsan *et al.* (2024). Hasil dari penerapan metode demikian adalah artikel sistematis yang menghadirkan analisis kritis dan argumentatif sesuai pendekatan filsafat. Studi ini berlangsung di Yogyakarta selama Juni-September 2024 dengan mengandalkan sumber data secara luring (buku dan jurnal fisik) dan data daring (internet dan repositori perpustakaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Geografi Kritis

Geografi merupakan salah satu disiplin keilmuan yang berfokus pada pembuatan gambaran tentang bumi sebagai tempat tinggal manusia. Setidaknya terdapat dua poros besar dalam disiplin geografi, yaitu geografi fisik dan geografi sosial—para geograf lebih sering menyebutnya geografi manusia. Geografi manusia adalah studi tentang pola dan proses lingkungan manusia atau sosial di bumi, termasuk perubahan populasi, ekonomi, budaya, politik, pemukiman, dan interaksi manusia dengan lingkungan alam (Mercier & Norton, 2019). Geografi manusia secara terpusat berkaitan dengan cara-cara tempat, ruang, dan lingkungan berposisi sebagai kondisi dan bagian konsekuensi dari aktivitas manusia (Gregory *et al.*, 2011). Dengan demikian, manusia memiliki peranan yang penting dalam membentuk dunia tempat tinggalnya sehingga manusia merupakan salah satu objek yang penting dalam disiplin geografi.

Manusia merupakan aktor sejarah yang setiap tindakannya dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya. Tindakan tersebut seringkali menghasilkan peristiwa besar yang mampu mengubah paradigma sosial di masyarakat pada masa itu. Akibatnya, geografi manusia selalu mengalami perubahan fokus, konten, dan praksis karena selalu dipikirkan

ulang oleh para geograf (Hubbard *et al.*, 2002). Geografi kritis menjadi salah satu contoh pemikiran ulang geografi manusia dengan sudut pandang yang berbeda tanpa mengikuti arus utama. Geografi kritis adalah sebuah kumpulan ide dan praktik yang beragam dan berubah dengan cepat dalam geografi manusia yang dihubungkan oleh komitmen bersama terhadap politik emansipatoris di dalam dan di luar disiplin ilmu, untuk mempromosikan perubahan sosial yang progresif dan pengembangan berbagai teori kritis dan aplikasinya dalam penelitian geografi dan praktik politik (Berg *et al.*, 2022). Beberapa poin yang dapat digaris bawahi dari pengertian sebelumnya adalah komitmen politik yang emansipatoris, promosi perubahan sosial yang progresif, dan pengembangan teori kritis dan aplikasinya pada penelitian geografi. Dua poin pertama mengacu kepada sejarah geografi radikal sebagai cikal bakal dari geografi kritis. Poin terakhir menjadi dasar dari gagasan geografi kritis hingga saat ini (J. R. Peet, 1969).

Geografi radikal merupakan salah satu bagian dari “gerakan” oposisi politis yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an yang bersatu mengangkat isu-isu domestik Amerika Serikat, seperti ketidaksetaraan, rasisme, seksisme, lingkungan, dan oposisi terhadap Perang Vietnam. Masuknya geografi dalam gerakan ini ditandai dengan beberapa geograf yang menulis isu-isu terkait dan hubungannya dengan pembahasan geografi di beberapa jurnal geografi arus utama. Selanjutnya, jurnal *Antipode: A Radical Journal of Geography* dikembangkan pada tahun 1969 di Universitas Clark, Massachusetts sebagai wadah yang dapat digunakan oleh para geograf untuk menulis argumentasinya. Fenomena ini terjadi karena banyak bermunculan geograf generasi baru lulusan sayap kiri dari beberapa universitas besar, ditambah dengan para ‘mualaf’ dari liberalisme dalam periode penindasan di Amerika Serikat dan Eropa. Kelompok ini ditandai dengan tingkat komitmen yang baru terhadap gerakan kesetaraan sosial dan ekonomi. Kelompok kiri yang baru ini percaya terhadap perubahan radikal dalam waktu singkat tanpa imbalan langsung bagi mereka yang menerapkan perubahan. Para geograf muda ini mencoba mengkritik geografi arus utama yang dianggap tidak relevan dengan situasi masyarakat saat itu. Tidak hanya mengkritik melalui tulisan, mereka juga berkomitmen untuk melakukan aksi nyata seperti mengubah opini publik melalui asosiasi akademik regional maupun nasional (Cresswell, 2013).

Lahirnya geografi kritis didasari oleh keinginan para geograf untuk melakukan hal yang benar-benar dapat memberikan pengaruh kepada realitas di sekitarnya. Geograf harus menjadi bagian dari masyarakat di wilayah yang mereka jelajahi; mereka harus menemukan jenis penelitian yang cocok dan perlu dilakukan untuk menyikapi masalah-masalah tersebut dengan penuh semangat. Masyarakat lokal juga harus dilatih dalam keterampilan geografis sehingga mereka dapat menjadi bagian dari solusi, bukannya hanya menjadi objek penelitian.

Keinginan tersebut muncul karena para geograf sadar bahwa selama ini ada yang salah pada masyarakat dan ilmuwan yang seharusnya dapat melakukan sesuatu ternyata tidak dapat melakukan apapun. Maka, Harvey (1972, pp. 10–11) menulis “tugas kita adalah memobilisasi kekuatan pemikiran kita untuk merumuskan konsep dan kategori, teori dan argumen, yang dapat kita terapkan dalam proses membawa perubahan sosial yang memanusiakan manusia. Konsep dan kategori ini tidak dapat dirumuskan secara abstrak. Mereka harus ditempa secara realistis dengan memperhatikan peristiwa dan tindakan

yang terjadi di sekitar kita.” Menurutnya, revolusi sejati pada pemikiran geografis dapat direalisasikan melalui komitmen terhadap praktik yang revolusioner.

Selanjutnya, Richard Morrill (1969) berpendapat bahwa para ahli geografi merasa khawatir terhadap fenomena transformasi sosial yang terjadi. Alasannya adalah karena geografi mendapatkan ‘kekuatan besar’ dari perguruan tinggi negeri yang tak terhitung jumlahnya dan dukungan finansial dari militer serta sumber-sumber pemerintah lainnya, tetapi hanya untuk riset konservatif, yakni lebih memilih untuk menyempurnakan pemahaman kita mengenai pola-pola spasial masyarakat sebagaimana adanya daripada mempertanyakan ‘kebenaran’ pola-pola tersebut, atau tanggung jawab masyarakat terhadap pola-pola tersebut. Menurutnya, para geografer perlu melakukan perubahan ‘radikal’ untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Morrill, 1969). Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat merupakan hasil dari keegoisan, ketidaksetaraan kekuasaan dan pendapatan, penekanan berlebihan pada efisiensi ekonomi, dan diskriminasi. Salah satu hal konkrit yang dapat dilakukan oleh para geografer radikal adalah mencoba untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik yang ramah lingkungan dan mengusung kesetaraan berkeadilan.

Kunci dari permasalahan ini adalah ide bahwa ruang bukanlah sesuatu yang netral, melainkan diproduksi secara sosial. Kapitalisme secara eksploitatif berusaha untuk menghancurkan tatanan ruang tertentu pada satu titik waktu untuk menciptakan tatanan baru yang lebih menguntungkan pada titik waktu berikutnya. Akibat dari fenomena ini adalah terbentuknya ketidaksetaraan pada kelompok-kelompok yang berada di pinggiran masyarakat kontemporer. Kelompok ini tidak mendapat fasilitas yang sama dengan kelompok lainnya di lingkungannya. Disiplin geografi perlu memberikan fokus kepada kelompok marginal ini dan menerima perubahan bahwa masyarakat hari ini lebih cair, terfragmentasi, dan dikonstruksi secara sosial. Hal ini membuat para geografer berpikir tentang cara menjangkau kelompok ini dan memasukkan suara mereka dalam penulisan geografi (Castree & Gregory, 2006; Gregory & Castree, 2012).

Pada pelaksanaannya, geografi radikal memiliki kesulitan tersendiri untuk mencapai tujuannya. Menurut Richard Peet (1998), geografi radikal bersifat radikal hanya pada topik dan politik, tetapi tidak pada teori atau metode analisis. Hal ini terjadi karena masih banyak geografer yang enggan untuk meninggalkan metode kuantitatif sebagai alat analisis masalah dalam geografi radikal. Dengan demikian, hasil analisis dari mereka terasa kurang menyeluruh dan tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Di tengah kebuntuan ini, David Harvey muncul ke permukaan dengan membawa argumentasi bahwa Marxisme dapat menjadi alat analisis yang lebih efektif dibandingkan positivisme. Meskipun keduanya memiliki basis materialisme dan metode analitik—dalam tradisi Anglo-Amerika—yang sama, terdapat perbedaan yang esensial di antara keduanya. Positivisme hanya berusaha untuk memahami dunia, sedangkan Marxisme berusaha untuk mengubah dunia (Harvey, 1972). Selain itu, Harvey, (1973) menulis buku *Social Justice and the City* yang dapat memberikan pengaruh besar kepada para geografer radikal. Fenomena ini cukup tidak terduga mengingat empat tahun sebelumnya Harvey (1969) baru saja menulis buku *Explanation in Geography* yang sangat kental dengan metode kuantitatif di dalamnya. *Social Justice and the City* berisi tentang perpindahan Harvey dari posisi liberal dan kritis yang berfokus kepada etika, bergeser

menuju Marxisme yang didasarkan kepada ilmu materialisme historis (Castree & Gregory, 2006). Munculnya David Harvey mengubah paradigma para geografer radikal dalam memahami akar permasalahan yang terjadi pada masa itu sehingga mulai tahun 1970-an geografi radikal lebih dikenal sebagai geografi Marx.

Menurut Castree & Gregory (2006), *Social Justice and the City* hanyalah bentuk transisi pemikiran David Harvey saja, tetapi Harvey merasa belum maksimal dalam memahami Karl Marx. Dengan kata lain, Harvey masih belum puas hanya dengan *Social Justice*-nya, sehingga beberapa tahun kemudian dia menghasilkan *The Limits to Capital* (1982) sebagai penyempurnaan karya sebelumnya. Dua hal yang menjadi fokus Harvey dalam buku ini adalah penjelasan cara kerja sistem kapitalisme melalui kritik ekonomi-politik Marx dan cara membangun fokus dalam transformasi spasial sebagai solusi permasalahan. Harvey mengagumi Marx karena dapat memberikan analisis terhadap kapitalisme sebagai modus produksi yang menghasilkan permasalahan ruang di masyarakat. Menurut Harvey, produksi ruang dalam analisis Marx tidak dibahas secara rinci dan hanya sedikit ilmuwan Marx setelahnya yang sadar terhadap itu. Salah satunya adalah Henri Lefebvre.

Henri Lefebvre adalah filsuf Marx yang berasal dari Prancis dan terkenal melalui salah satu karyanya *La production de l'espace* (1974) yang membahas tentang ontologi ruang menggunakan analisis Marxisme. Tujuan proyek Lefebvre (2013) adalah untuk mengembangkan seperangkat gagasan tentang urbanisme yang dapat menstimulasi tindakan radikal terhadap modus dominasi kapitalis yang baru dan menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan Lefebvre, Harvey (2019a, 2019b) berpendapat bahwa teori Marx harus dikembangkan untuk memperhitungkan cara krisis produksi kapitalis diatasi dengan membuka kemungkinan-kemungkinan modus akumulasi baru. Dengan demikian, Harvey mencoba menggunakan metode materialisme historis—dia sendiri lebih senang menyebutnya dengan materialisme historis-geografis—dalam memahami sifat alamiah ruang dan waktu sebagai struktur paling dasar dari sebuah realitas, termasuk aktivitas manusia. Metode ini tidak dapat dilakukan tanpa memahami dialektika spasio-temporalitas. Lefebvre, yang mengenalkan konsep dialektika tiga dimensi dalam hubungan sosiospasial, dapat mengisi penjelasan dialektika spasio-temporalitas dalam metode ini (Harvey, 2018). Terpantik oleh pertemuan ide-ide sebelumnya, para geografer radikal mulai menggunakan pendekatan dan metode Marx dalam mengajar, menulis, dan melakukan penelitian. Perbedaan antara geografi radikal dan geografi Marx tidak terletak pada praktik politik sehari-hari, melainkan pada kedalaman dan gaya praktik intelektualnya (Lefebvre, 2014). Geografi Marx memiliki sentuhan yang jauh lebih besar dengan teori-teori sosial lainnya melalui kumpulan karya-karya Marx.

Bersentuhan dengan teori-teori sosial lainnya membuat geografi Marx mendapatkan kritik dari Anthony Giddens (1981), seorang sosiolog asal Inggris, melalui teori strukturasi tentang kemampuan manusia yang dapat melawan dominasi struktur sosial yang dikhawatirkan oleh Marxisme. Munculnya teori ini menandai datangnya periode palingan spasial yang di dalamnya banyak ilmuwan-ilmuwan sosial lain memasukkan analisis ruang ke dalam teorinya: Manuel Castells (1989), Fredric Jameson (1991), Richard Sennett (1994), Stuart Hall (1996), hingga Zygmunt Bauman (1998). Selain itu, geografi manusia juga mengalami perkembangan pesat selama periode

palingan spasial berlangsung. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya teori-teori yang muncul dan berkembang. Neil Smith (1984) mengemukakan teori produksi alam dan ketimpangan pembangunan yang terinspirasi dari teori kritis Frankfurt. Alih-alih berfokus kepada konflik kelas, mereka menjadikan alam sebagai pusat analisis terhadap kapitalisme. Menurut Smith, alam yang semula merupakan ruang absolut (alami) bagi manusia dapat berubah menjadi ruang relatif (sosial) dalam gerakan yang kontradiktif seiring berkembangnya kekuatan produksi. Pembangunan membebaskan masyarakat dari kendala ruang alam, mengarah ke “pemerataan”, tetapi hanya dengan menenggelamkan modal ke dalam ruang-ruang tertentu, menghasilkan diferensiasi dan ruang relatif (Cresswell, 2013).

Para geograf radikal mencoba mengembangkan arah studi dan penelitian geografi menjadi lebih aktif terhadap isu-isu sosial yang terjadi dan menyelidiki akar permasalahannya untuk mendapatkan solusi yang dapat dijadikan landasan kebijakan daerah. Trevor J. Barnes dan Eric Sheppard (2019) menunjukkan secara historis perkembangan geografi kritis yang awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara lalu berkembang di seluruh dunia, termasuk wilayah Afrika, Asia, Australia, dan belahan Eropa Timur. Saat ini kajian geografi kritis sejak tahun 1970an telah berkembang tidak hanya menjelaskan aspek geografi *per se* tetapi juga memberikan perluasan analisis yang lebih luas. Selain itu, Lawrence D. Berg *et al.* (2022) menempatkan kajian geografi kritis sebagai tiga bentuk kajian tentang ruang atau keruangan secara filosofis namun tetap memuat dimensi ilmiah dalam lingkup geografi. Geografi kritis selalu mengasumsikan ruang sebagai suatu ruang analisis ilmiah yang tidak terlepas dari konstruksi sosial. Oleh karena terkonstruksi secara sosial, geografi kritis menempatkan kajian keruangan geografis dalam kerangka *space as difference* dan *space as social spatiality*. Artinya, pemahaman manusia tentang ruang hidupnya tidak pernah sama, netral, dan universal satu dengan yang lainnya dikarenakan adanya pembeda dan spasialitas sosial yang sangat dinamis.

Pada abad kedua puluh satu, gagasan geografi kritis semakin meluas dan akhirnya berubah menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami disiplin geografi manusia. Teori-teori yang sudah muncul sebelumnya disusun ulang dan dikelompokkan menjadi berbagai macam sub-disiplin dalam geografi manusia untuk memudahkan para geograf melakukan risetnya. Alhasil, Sarah A. Lovell *et al.* (2023) mencoba melakukan pemetaan terhadap macam-macam sub-disiplin serta metodologinya dalam disiplin geografi manusia kontemporer diantaranya geografi politik, geografi ekonomi, geografi sejarah, geografi pendidikan, geografi anarkis, geografi ras, geografi emosi, geografi *queer*, geografi *indigenous*, geografi dekolonial, geografi urban, geografi anak, geografi disabilitas, geografi hewan, geografi digital, geografi SIG, dan geografi kesehatan.

Menariknya, isu-isu yang dibahas dalam geografi semakin meluas dan bervariasi seiring berjalannya waktu. Problem-problem kontemporer, menurut Sarah A. Lovell *et al.* (2023), dalam penelitian geografi manusia yang sering kali bersinggungan dengan disiplin lain, diantaranya isu politik, non-manusia, ruang hidup, pengalaman hidup, ketidaksetaraan gender, ketidakadilan lintasgenerasi, geografi representasi dan pelampauan representasi, feminisme, kebijakan publik, sampai metode penelitian riset geografi. Tidak hanya itu, geografi kritis memberikan ruang kritik yang

lebih terbuka, termasuk membayangkan ruang sebagai proses yang sangat dinamis (*spatial process*) (Huber, 2019).

Metodologi Geografi Kritis

Meskipun menyandang label yang sama, para geograf kritis memiliki pendekatan beragam. Tidak ada metode yang menyatukan semua geograf kritis. Namun, geografi kritis digiatkan melalui pembacaan dan perujukan terhadap teori dari luar geografi, terutama ilmu sosial dan humaniora. Secara umum, geografi kritis tidak menunjukkan penggunaan alat pemetaan fisik, semacam sistem informasi geografis (SIG), secara mandiri. Penggunaan SIG hanya dilakukan untuk mendukung suatu argumen mengenai kondisi sosial.

Para geograf ‘kritis’ menggunakan label tersebut sebagai upaya untuk memisahkan diri dari berbagai aliran atau pengotakan yang telah mapan sebelumnya; sebuah deklarasi bahwa geografi yang mereka lakukan adalah geografi yang, di satu sisi, tidak positivis dan, di sisi lain, tidak sepenuhnya liberal ataupun Marxis. Namun, penggambaran mereka terhadap dunia didasari oleh berbagai perspektif teoretis dan informasi empiris. Disiplin dan bangun konseptual yang ditarik untuk geografi kritis beragam dan luas: ekonomi politis, tata kelola pemerintahan, isu gender, hingga geopolitik (Blomley, 2006). “Kritis” dalam geografi kritis memperlihatkan kedekatan kajian keruangan dengan teori-teori yang biasa dikategorikan emansipatoris atau anti-*status quo*. Teori-teori tersebut dapat berupa Marxisme (ataupun *pasca-* dan *neo-*), feminisme, pascakolonialisme, dan pascastrukturalisme. Keempatnya berbagi kecenderungan melihat sistem mapan sebagai pembentuk keajegan yang menindas dan terus mereproduksi ketimpangan. Akan tetapi, geografi kritis mereformulasi teori-teori kritis untuk diterapkan dalam masalah sosial dan kaitannya dengan ruang. Ia berfokus kepada “pengungkapan berbagai proses sosiospasial yang menyebabkan ketidaksetaraan antara orang dan ruang” (Hubbard *et al.*, 2002, p. 62).

Salah satu tema besar dalam kajian kritis, termasuk geografi kritis, adalah penekanan peran representasi sebagai situs dominasi dan resistensi. Geografi kritis mencoba untuk menekankan posisi ruang sebagai sesuatu yang tidak hanya dipersepsi, tetapi juga dikonsepsikan (dijadikan dan dimanipulasi sebagai representasi) dan dihidupi. Lefebvre (2013, p. 38) memandang bahwa perencanaan urban, insinyur, atau arsitek (dan geograf) memiliki daya untuk mengubah ruang sebagaimana dihidupi oleh manusia. Mereka melakukannya melalui pembentukan representasi yang secara implisit juga menghadirkan otoritas untuk mengubah ruang-yang-dihidupi (*lived space; representational space*) (C. Schmid, 2022). Salah satu upaya geografi kritis adalah mendekonstruksi representasi untuk mendefinisikan relasi kuasa serta konsekuensi spasial dan sosial yang muncul darinya (Gaudelli & Patterson, 2012). Artinya, setiap representasi selalu bermuatan politis dan bekerja untuk memajukan kepentingan tertentu. Untuk memutarbalikkan hal tersebut, kajian kritis bekerja melawan hegemoni representasi yang dominan. Geografi kritis menolak klaim bahwa ilmu bebas nilai sehingga representasi yang dihasilkannya pun bermuatan politis dan memajukan kepentingan tertentu, biasanya yang bersifat marjinal (Blomley, 2008).

Meskipun, secara umum, geograf kritis menghindari pendekatan yang SIG-sentris, geografi kritis ikut mewarisi metodologi visual dan analisis terhadap teks melalui jalur geografi manusia yang mendekatkan diri dengan teori sastra.

Geografi kritis berkontribusi dalam eksplorasinya terhadap pemahaman mengenai peran sosial dari cerita dan narasi (Schlosser, 2022). Kehadiran fiksi dan spekulasi geografis (mis. *terra incognita*) menghadirkan pertanyaan baru dan pembayangan ulang politik global (Cameron, 2012; Strauss, 2015). Pewarisan ini dilatarbelakangi gerakan dari dalam geografi neo-Marxis yang mengkritik geografi humanis sebab idealisme dan subjektivismenya. Namun, kehadiran Henri Lefebvre (1901-1991) dan Raymond Williams (1921-1988) menggeser tendensi strukturalis dan ekonomistik yang sebelumnya tampak dalam analisis geografi neo-Marxis (Aitken & Valentine, 2006). Kini, geografi kritis tidak menolak kehadiran percakapan humanis, seperti hubungan antara tempat dan identitas dan geografi kehidupan sehari-hari (Harvey, 1996).

Metodologi feminis tampak dalam geografi kritis melalui penekanan peran tubuh, subjektivitas, dan posisionalitas (mis. gender, ras, kelas, dan seksualitas) dalam penelitian geografis (Billo, 2022; Hiemstra & Billo, 2017). Geografi kritis berbasis feminisme melihat ulang cara tubuh dan latar belakang geografis termanifestasi dalam menghasilkan perspektif dan bias. Di sisi lain, geografi kritis juga melihat kesadaran terhadap tubuh sebagai basis yang penting dalam melakukan resistensi terhadap dominasi. Salah satu metode yang ditawarkan dalam lini ini adalah *cuero-territorio* (Zaragocin & Caretta, 2021). *Cuero-territorio* menekankan kebertubuhan sebagai penyedia relasi utama antara manusia dengan tanah (atau wilayah) yang ditinggalinya. Aktivitas yang menghasilkan kekerasan berbasis gender di tempat tinggal sekelompok orang dapat dipresentasikan dalam bentuk peta tubuh (*body map*) untuk menginspirasi refleksi kolektif. Secara bersamaan, *cuero-territorio* juga merupakan bentuk metode geografis dekolonial sebab ia berasal dari komunitas feminis kelompok pribumi di Amerika Latin.

Pascastrukturalisme dan pascakolonialisme muncul dalam diskursus geografi kritis sebagai upaya untuk mengenali ruang dan budaya sebagai sesuatu yang plural, heterogen, dan relasional. Pascastrukturalisme, terutama, memberi penekanan bahwa makna dan berbagai konsep yang terberi dalam ilmu sosial, termasuk (dalam artian luas) geografi, bersifat tidak tetap (Woodward *et al.*, 2009). Konsep dalam geografi yang umum digunakan, termasuk lahan, tanah, dan *alam*—yang dikomodifikasi menjadi *sumber daya*—mendapatkan makna demikian akibat sejarah panjang kolonialisme pemukim (Gregory, 1998; Simpson, 2017). Jika makna pernah disematkan, maka makna dapat dilucuti dan disematkan ulang. Geografi kritis, menurut Tim Cresswell (2013) harus turut memperhatikan cara makna dan konsep terhubung dalam relasi sosial dan relasi kuasa. Konstruksi klaim kebenaran melalui argumentasi epistemologis memperkuat “palingan interpretatif” (“*interpretive turn*”) dalam geografi akibat pertemuan pascakolonialisme dengan geografi (Barnett, 2006). Dengan demikian, kritik terhadap paradigma kolonial dalam geografi memungkinkan pemahaman bahwa nilai objektivitas ilmiah sulit dicapai.

Pada praktiknya, geografis kritis juga turut berkontribusi dalam produksi peta. Bagaimana demikian jika, sebagaimana ditunjukkan oleh pascastrukturalisme, keajegan identitas dan representasinya merupakan sesuatu yang tidak mungkin dan justru membahayakan? Menurut Bryan (2009), objektivitas saintifik yang diklaim oleh kartografi hanya menyembunyikan konsepsi ideal sepihak mengenai ruang dan pengetahuan dominan. Oleh karena itu, lanjut Bryan (2022) geografi kritis

mencoba untuk melihat produksi peta melampaui kartografi dan geografi konvensional. Geografi kritis harus peka terhadap cara dan situasi pembacaan, penggunaan, dan interaksi dengan peta oleh orang-orang. Dengan kata lain, geografi kritis memandang peta sebagai artefak yang secara inheren bersifat sosial, kultural, dan politis sehingga juga dapat digunakan untuk resistensi dan emansipasi. Peta memang berguna dalam menganalisis kebijakan dan praktik sosial, tetapi geografis kritis tetap memandang peta sebagai reduksi dari kenyataan.

Dapat diambil kesimpulan sejauh ini bahwa sejatinya geografi kritis tidak disatukan oleh ontologi, epistemologi, dan metodologi yang sama. Namun, pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh geografis kritis dapat dipetakan dan semuanya berkomitmen mengupas proses sosiospasial yang me-(re)-produksi ketidaksetaraan antara manusia dan tempat. Tujuan utama geografi kritis adalah menantang berbagai bentuk kekuasaan politis dan ekonomis yang berada di dalam ruang. Artikulasi alternatif geografis yang mungkin, baik secara teoretis maupun praktis, berperan krusial dalam politik emansipatoris (Harvey, 2001). Tanpa pembayangan mengenai cara-cara lain dalam berinteraksi dengan ruang, kita tidak dapat bergerak menuju rekonfigurasi sosiospasial yang berkeadilan.

Implementasi Terapan Geografi Kritis

Kehadiran geografi kritis memungkinkan penelusuran berbagai institusi sosiokultural dan interaksi manusia dengan alam dengan hasil akhir emansipatoris. Tinjauan pustaka telah menampilkan fleksibilitas geografi kritis untuk diterapkan di berbagai diskursus ilmiah. Karya Bennett & Layard (2015), misalnya, menunjukkan hubungan antara hukum, geografi, dan kekuasaan dan posisi geografi kritis sebagai kajian formatif bagi perkembangan geografi legal. Mereka melanjutkan diskusi mengenai regulasi, legislasi, serta vonis persidangan dan implikasinya terhadap pemahaman spasial hukum. Mereka mempertegas posisi ruang dan hukum sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara politis. Karya tersebut senada dengan kajian lebih lanjut mengenai hubungan ruang dan hukum, seperti penelitian milik Nalle (2021).

Ozias & Pasque (2019) mengambil latar universitas untuk membicarakan kemampuan kelompok masyarakat luar kampus dalam memulai perubahan sosial. Universitas kini semakin dikarakterisasi melalui kapitalisme akademik dan profitabilitas riset di samping tugas universitas untuk mengabdikan kepada masyarakat. Menurut mereka, geografi kritis dapat menjadi kerangka kerja teoretis untuk pedagogi kritis berupa pembelajaran penguatan masyarakat. Serupa dengan itu, dalam rangka memajukan kerangka pedagogis untuk pendidikan perubahan iklim, Fuchs (2023) memadukan literasi terhadap ruang dengan metode partisipatoris berbasis-tempat. Fuchs memanggil pemupukan “kehendak politis” dari siswa, guru, dan sekolah untuk melakukan pengajaran iklim berbasis-tindakan (*action-oriented*).

Di sisi lain, karya Donovan (2017) dan Doshi & Ranganathan (2019) menggarisbawahi tendensi pemerintah untuk mengintervensi kegiatan masyarakat hanya untuk kepentingan kapitalisme belaka. Menurut Donovan (2017), bentuk *biopower* dan *geopower* yang dimiliki oleh pemerintah mampu memanfaatkan ketidakpastian terhadap sistem alam untuk kepentingannya sendiri. Kajian ini diperkuat oleh Doshi & Ranganathan yang mengutarakan dengan berani bahwa praktik korupsi bersifat niscaya untuk melanjutkan kapitalisme, terutama di konteks Selatan Global, termasuk

Indonesia. Pengkhianatan terhadap 'kekuasaan yang diamankan', menurut mereka, dimanifestasikan dalam tiga bentuk kekerasan, yakni simbolik, material dan teritorial.

Terakhir, kami meninjau Najib (2024) yang mengimplementasikan geografi kritis untuk mencari tahu hubungan kekerasan simbolik dengan spasialitas. Menggunakan contoh kasus Islamofobia, kita dapat memetakan posisi Islamofobia sebagai kesenjangan antara dunia Islam dengan dunia Barat. Najib berkomentar bahwa perlawanan terhadap Islamofobia harus dilakukan melalui proliferasi dan pemberdayaan geograf-geograf Muslim.

Contoh-contoh di atas merupakan sekian pustaka yang sangat terbatas untuk melihat secara luas penggunaan geografi kritis dalam berbagai bidang. Banyak karya mengeksplorasi hubungan keruangan dan kekuasaan, misalnya untuk membahas urbanisasi (Harvey, 2009), pertanian (Tornaghi, 2014), dan pariwisata (Devine & Ojeda, 2017). Di masa depan pun kerangka kerja geografi kritis yang lebih terdefinisi dapat menjadi alat analisis aspek-aspek sosiokultural lainnya.

Refleksi Filosofis 'Kritis' Masa Depan Wacana Geografi Kritis serta Filsafat Geografi di Indonesia

Pada bagian akhir artikel ini, kami mencoba untuk merefleksikan ulang wacana yang telah menjadi perhatian geograf di Indonesia, terutama terkait pengembangan filsafat geografi dan terapan geografi kritis. Refleksi ini bertujuan untuk memetakan kembali beberapa permasalahan pokok yang dapat menjadi perhatian untuk penelitian lanjutan. Pertama, berdasarkan hasil temuan data penelitian yang kami gunakan, kami menemukan adanya ketimpangan pembacaan tentang filsafat geografi. Problem ini terjadi secara turun-temurun sebab adanya 'keserampangan epistemik'. Keserampangan epistemik ialah pilihan term yang merujuk kepada kerumitan cara berpikir (epistemik) yang bercabang-cabang, seperti ketidakjelasan term yang dipilih untuk mendefinisikan suatu penjelasan filosofis.

Permasalahan ini berlanjut sampai dengan kemunculan kerancuan istilah-istilah filsafat yang diterjemahkan secara kurang tepat dalam pendefinisian filsafat geografi di Indonesia. Kedua, terdapat permasalahan yang perlu untuk direfleksikan bersama tentang strategi melampaui keterbatasan-keterbatasan

yang dibentuk oleh adanya antagonisme intelektual antara disiplin keilmuan. Refleksi kritis pada bagian kedua ini bertujuan untuk membuka lebih besar peluang dialogis antar disiplin keilmuan sehingga geografi benar-benar dapat mengukuhkan dirinya sebagai sains yang multidisiplin. Terakhir, refleksi atas makna 'kritis' dalam geografi kritis yang termanifestasikan dalam laku (*praksis*) para geograf.

Keserampangan Epistemik Filsafat Geografi

Diskursus filsafat geografi akhir-akhir ini didorong oleh beberapa publikasi di Majalah Geografi Indonesia (Aksa *et al.*, 2019; Ikhsan *et al.*, 2024; Sejati *et al.*, 2022). Ketiganya mencoba untuk menghidupkan kembali aktivitas saintifik geografi dengan mengkaji kembali tapal batas geografi di antara ilmu-ilmu lain, hingga batas tertentu. Namun, kami berargumen bahwa ketiga karya tersebut membaca filsafat geografi secara terbatas dan tidak benar-benar berkontribusi baik kepada diskursus filsafat geografi yang luas maupun kepada praktik ilmiah geografis di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan dalam tujuan sederhana yang coba mereka capai, ketiganya gagal untuk meniti alur filosofis dan saintifik yang diperlukan. Pembahasan metafilsafis berikut bertujuan menerangi cara geograf mendekati filsafat geografi.

Pertama, Aksa *et al.* (2019) mencoba untuk memetakan masalah dari kondisi geografi kontemporer di Indonesia. Mereka melihat bahwa geografi kini termarginalkan sebab, di satu sisi, tidak terkungkung dalam objek material yang unik dan, di sisi lain, geograf terspesialisasi (menuju geografi fisik, sosial, dan teknik) sehingga praktik geografi di Indonesia tidak bisa dikonsepsikan secara utuh. Aksa *et al.* (2019) berargumen bahwa geografi terlibat dalam interaksi yang terlalu intens dengan ilmu-ilmu lain sehingga geografi menerima corak ilmu lain dan 'kehilangan jati diri'. Dalam prosesnya, geografi menjadi ilmu orde-kedua (*second-order*) yang hanya menyediakan data bagi ilmu-ilmu lain. Singkatnya, geografi menjadi ilmu bantu. Akar masalahnya, menurut mereka, adalah ketidakpahaman geograf dan pendidik geografi terhadap hakikat ilmu geografi. Untuk menjabarkan hakikat ilmu geografi, Aksa *et al.* (2019) berpaling menuju filsafat geografi dalam bentuknya yang paling minimal dan mencoba merumuskan "ontologi", "epistemologi", dan "aksiologi" dari geografi.

Tabel 1. Contoh literatur penerapan geografi kritis untuk berbagai topik

Topik	Literatur	Ringkasan
Hukum	(Bennett & Layard, 2015)	- Eksplorasi hubungan antara hukum dan kekuasaan dan hubungannya dengan spasialitas dalam pembentukan kajian geografi legal
Aktivisme sosial		- Pemasukan analisis kritis terhadap ruang untuk membangun kemitraan masyarakat dan universitas
Mitigasi bencana	(Donovan, 2017)	- Potensi manipulasi opini pakar dalam pengurangan risiko bencana (PRB) dan pertimbangan membangun riset PRB berbasis teori asemblase
Korupsi	(Doshi & Ranganathan, 2019)	- Keterkaitan tindakan korupsi dengan akumulasi kapitalis dan peran penting praktik korupsi untuk keberlangsungan kapitalisme, terutama dalam konteks Selatan Global
Islamofobia	(Najib, 2024)	- Refleksi terhadap dimensi spasial dari Islamofobia dan kebutuhan rekognisi geografi Muslim
Pendidikan perubahan iklim	(Fuchs, 2023)	- Menggabungkan literasi konseptual, kontekstual, dan kritis dalam pedagogi lingkungan dengan metode partisipatoris berbasis-tempat dan orientasi kepada keadilan

Sumber: Olahan pustaka penulis (2024).

Pembagian filsafat menjadi tiga cabang di atas sudah menyebar luas di dalam diskursus filsafat ilmu di Indonesia tanpa justifikasi yang jelas. Dalam tiga karya filsafat geografi yang dibahas di sini, di samping kumpulan karya lain di Indonesia, pembagian tersebut diterima dan dipakai begitu saja tanpa upaya untuk membenarkannya kembali. Hal ini menjadi masalah sebab ketiga karya di atas sangat terbatas membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi hanya dalam term metodologis. Ontologi disamakan dengan penentuan objek material studi dan pendekatan yang mungkin digunakan. Epistemologi disamakan dengan metode yang dapat dipakai untuk mengkaji objek material. Aksiologi disamakan dengan manfaat potensial spesifik dari sebuah ilmu. Padahal, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih radikal untuk mengulik tendensi dan asumsi yang seakan terberi di dalam metodologi ilmu.

Tidak hanya menentukan objek material, ontologi justru hadir di hadapan ilmu untuk kembali mempertanyakan ulang eksistensi objek di dunia dan kemungkinannya untuk dikaji. Ontologi geografi tidak hanya upaya untuk menyebutkan bahwa objek material geografi adalah “fenomena geosfer”, tetapi juga mempertanyakan ragam pengada yang disebut “fenomena geosfer”, komposit-komposit yang mengonstitusinya, dan berbagai relasi yang membuatnya emergen. Padahal, ontologi geografi yang dipakai di geografi Indonesia harus dapat membahas hal-hal tersebut untuk menghasilkan filsafat geografi yang jelas.

Ketiga karya turut merujuk ke seminar lokakarya Ikatan Geograf Indonesia (IGI) tahun 1988 yang memunculkan kesepakatan bersama mengenai objek material dan pendekatan geografi di Indonesia. Kesepakatan terbatas tersebut sayangnya tidak cukup mematenkan “ontologi” yang ingin dikejar di geografi Indonesia sebab masih terdapat asumsi yang harus dikupas dan diargumentasikan dengan layak. Kami melihat bahwa “ortodoksi” geografi semacam ini justru menuntut penolakan dari geograf. Keterpakuan geograf Indonesia terhadap lokakarya IGI tahun 1988, sebagaimana penegasan Ikhsan *et al.* (2024) bahwa definisi geografi dari pakar harus mengakomodasi definisi IGI, membatasi formulasi ontologi geografis yang lebih segar. Hal itu sudah dimulai selangkah oleh Sejati *et al.* (2022) melalui penolakan mereka terhadap hasil seminar lokakarya IGI tahun 1988 melalui pengakuan mereka bahwa karya-karya Peter Haggett bekerja sebagai “dasar pemaparan ontologi geografi”. Pada akhirnya, upaya pembangkangan terhadap “ontologi” yang disepakati melalui IGI harus dimajukan dan hal tersebut dapat dilakukan melalui pencarian ontologi geografi alternatif.

Selain itu, epistemologi geografi yang dianggap sama dengan identifikasi metode dalam riset geografis membutuhkan penjelasan ulang mengenai epistemologi. Epistemologi, sebagaimana ditangkap dengan akurat oleh Aksa *et al.* (2019) dan Ikhsan *et al.* (2024), merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang “benar” dan “tepat”. Hal ini dilakukan melalui, pertama-tama, mempertanyakan apa makna “pengetahuan”, “benar” dalam konteks pengetahuan, dan cara membedakannya dari pengetahuan yang “salah” (ataukah pengetahuan yang “salah” bukan “pengetahuan”?) Jika diperpanjang menuju filsafat ilmu, kita dapat mempertanyakan batas pengetahuan yang dimungkinkan melalui ilmu, justifikasi yang valid untuk membenarkan empiri, dan cara merepresentasikan “realitas objektif” jika hal demikian benar-benar ada. Oleh karena itu, filsafat geografi Indonesia dapat menginkorporasikan pertanyaan-pertanyaan

tersebut untuk merumuskan epistemologi geografi. Tentu, epistemologi tidak sepenuhnya terpisah dari metodologi. Namun, metodologi harus didasari oleh epistemologi yang mampu membenarkannya. Epistemologi geografi bukanlah sekadar “kuantitatif”, “kualitatif”, atau “*mixed methods*”. Epistemologi geografi adalah mempertanyakan, “Bagaimana cara merepresentasikan realitas fisik dan sosial melalui perantara mesin?” “Bagaimana cara membenarkan pengetahuan geografis tanpa merujuk kepada upaya justifikasi yang sirkuler?” “Pengetahuan macam apa yang diharapkan muncul dari upaya ilmiah geografis?”

Terakhir, aksiologi geografi masih dianggap pengidentifikasian manfaat yang dapat muncul dari praktik ilmiah geografis. Namun, di sini, masih terdapat pertanyaan terkait nilai yang masih dapat dicoba jawab oleh geograf Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa, tetapi tidak terbatas kepada, “Apakah geografi bebas-nilai?” “Bagaimana relasi praktik ilmiah geografis dengan ideologi?” “Bagaimana cara membenarkan subjektivitas dan tendensi ekstra-saintifik di dalam praktik geografi?” Aksiologi bukan hanya pembahasan mengenai manfaat geografi untuk pembangunan berkelanjutan atau kerja Internet. Aksiologi menghadiri filsafat geografi untuk mengupas tuntas keinginan kita untuk membentuk geografi yang “ideal”.

Dengan demikian, kembali ke Aksa *et al.* (2019), kita dapat melihat bahwa pembahasan ontologi yang ditawarkan butuh banyak pengembangan. Pertanyaan yang ditawarkan Aksa *et al.* (2019) sejatinya penting bagi diskursus ilmiah geografi secara luas: “Bagaimana sebaiknya geografi berelasi dengan ilmu lain?” Pertanyaan ini memiliki daya untuk membuka diskusi. Namun, Aksa *et al.* (2019) bersikeras bahwa geografi harus menjadi murni dengan kembali kepada pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah yang khusus bagi geografi serta bahwa geografi terjebak dalam singgungan dengan ilmu lain. Sebaliknya, kami melihat bahwa “purifikasi” yang ditawarkan oleh Aksa *et al.* (2019) masih menunjukkan inkonsistensi epistemik. Bagi mereka geografi harus membahas aspek alami dan sosial dari fenomena kebumihan, dan geografi mampu sebab geografi adalah ilmu utuh yang bisa membahas alam dan sosial tanpa perlu merujuk ke ilmu lain. Akan tetapi, Aksa *et al.* (2019) kemudian membalikkan proposisi tersebut dengan memosisikan ketiga pendekatan sebagai opsi dan bukan tuntutan objek material.

Sejati *et al.* (2022) juga mengajukan pertanyaan ontologis penting bagi geografi: dengan kehadiran dunia virtual, “apa itu ruang siber?” Geografi adalah salah satu ilmu yang mampu membahas ruang dan pertanyaan ini cukup baru sehingga masih menunggu jawaban. Namun, karya Sejati *et al.* masih belum mampu memberikan jawaban bagi pertanyaan tersebut—di samping pertanyaan lain, seperti “Apakah ruang siber riil dan dalam term apa mereka riil?”; “Bagaimana cara mengetahui dan merepresentasikan ruang siber?”; “Adakah etika dalam ruang siber?”; “Kenapa ruang siber layak diperhatikan oleh geograf?”; dan seterusnya. Mereka membuka diskursus menuju ontologi ruang siber dan kami harap lebih banyak geograf Indonesia dapat membahas hal tersebut.

Kita dapat melihat bahwa karya Ikhsan *et al.* (2024) telah mencoba mempostulatkan posisi onto-epistemologi geografi. Mereka berkali-kali menegaskan posisi geografi sebagai kajian terhadap “fenomena geosfer”. Tendensi fenomenologis ini dipastikan ketika mereka kemudian menggunakan “fenomenologi geografi”. Posisi ini tentu memiliki implikasi

filosofis. Dengan memadatkan posisi fenomenologi, mereka dapat saja menolak ontologi geografi dan mencoba menegaskan bahwa geografi hanya dapat berbicara dalam tataran pengetahuan atau pengalaman-yang-dihidupi (*lived experience*). Akan tetapi, banyak kesenjangan yang perlu dijumpai untuk menghasilkan proposisi onto-epistemologis yang koheren. Pernyataan mereka (p. 29)—“Pendekatan fenomenologi geografi menekankan pada subyek *”noumena”* sebagai fokus penelitian dan analisis data dapat dilakukan menggunakan triangulasi menggunakan model Miles dan Huberman”—seakan-akan memberikan solusi terhadap transendentalisme Kantian hanya dalam satu kalimat. Kami mengundang upaya lain untuk membahas kemungkinan geografi melampaui representasi sebagai ekstensi dari kritik ini.

Klaim Ikhsan *et al.* (2024) tentang “Paradigma Filsafat Geografi Kontemporer” menjadi problem epistemik dalam pemilihan istilah Paradigma dan Kontemporer. Paradigma atau *Paradigm* digunakan oleh Thomas Kuhn (2012) merujuk pada struktur berpikir yang membuat sains dapat memecahkan berbagai teka-teki (enigma) dalam dunia ilmiah secara efisien. Paradigma sendiri merujuk kepada keseluruhan isi teoretis dalam metode kerja yang diterima oleh komunitas ilmiah. Paradigmalah yang mengarahkan bagaimana riset seharusnya dilakukan, sekaligus mengukuhkan konsensus antar komunitas ilmiah, contohnya: paradigma Newtonian dan paradigma kuantum (Shan, 2024). Di sisi lain, mereka belum mempertimbangkan siklus empat tahap dalam paradigma ilmiah Kuhnian, 1) sains normal (paradigma lama), 2) terjadinya krisis atau anomali, 3) sains ekstra-normal, 4) revolusi ilmiah dan menjadi sains normal baru dengan paradigma baru, begitu seterusnya. Sayangnya, mereka tidak menunjukkan paradigma-paradigma seperti apa yang telah tersusun dalam paradigma geografi lama dan geografi baru atau yang mereka sebut sebagai geografi kontemporer. Titik balik revolusioner apa yang ditawarkan oleh paradigma baru ala Ikhsan *et al.* (2024)?

Sebagai penutup dari segmen ini, kami akan berkomentar mengenai pendidikan geografi yang menariknya memuat bobot dalam ketiga karya. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan geografi adalah bagian penting dari riset geografi dan itu adalah bidang yang dapat kita kembangkan bersama. Aksa *et al.* (2019) menyebutkan bahwa pendidikan geografi di sekolah yang hanya menekankan hafalan fenomena geosfer dan bukan dorongan untuk berpikir kritis dan analitis menjadi salah satu masalah siklik dari riset geografi yang terbatas. Di sisi lain, Sejati *et al.* (2022, p. 132) menulis bahwa edukasi geografi dari tingkat sekolah dasar memerlukan “pengajaran dengan aksiologi keilmuan yang kuat”. Sedangkan, Ikhsan *et al.* (2024, p. 32) menegaskan bahwa “riset pendidikan harus dikembangkan.” Apa sejatinya yang diajarkan dalam pendidikan geografi? Apakah “cara melihat bumi menggunakan mesin”? Melihat tren geografi kini, kami tidak bisa melihat riset geografi yang bermakna “untuk geografi sendiri”. “Pembuatan representasi bumi menggunakan mesin” juga kini telah diadopsi oleh berbagai disiplin teknik. Geografi seakan nyaman hanya menyediakan data yang berharga untuk berbagai ilmu lain dan praktik politik. Namun, upaya untuk membebaskan geografi dari singgungan dengan ilmu lain justru kontraproduktif bagi praktik ilmiah geografi dan pendidikan geografi. Hal itu, bagi kami, menunjukkan bahwa pendidikan geografi harus berfokus kepada melihat diskusi interdisipliner dan politis geografi. Rujukan kepada

geocapabilities (Uhlenwinkel *et al.*, 2017) dan “geofilia” melalui pendidikan eksperiensial dalam Aksa *et al.* (2019) adalah langkah yang tepat. Apa itu “geografi untuk dirinya sendiri” jika bukan kerja eksplorasi dan petualangan bertubuh yang telah direnggut oleh SIG? Siswa-siswi pembelajar geografi, terutama di sekolah dasar dan menengah, membutuhkan pengenalan terhadap ruang yang mereka tinggali melalui penelusuran langsung (Dolan, 2016). SIG adalah alat yang mampu menangkap citra dan memproduksi gambaran ruang, tetapi titik keberangkatan pendidikan geografi haruslah penjelajahan dengan pengalaman seakan SIG tiada.

Kajian metafilsafis singkat tersebut diharapkan dapat menggambarkan jalan yang mungkin ditempuh bagi filsafat geografi (di) Indonesia untuk dapat merumuskan posisi geografi di lanskap ilmiah dan politis. Filsafat Geografi Indonesia belum, dan tidak boleh, mapan dalam versinya sekarang. Mengapa demikian? Kita dapat menelusuri jika Filsafat Geografi di Indonesia belum memberikan pijakan atau fondasi filsafat yang cukup kritis dan mapan, maka akan terjadi pengulangan atas keserampangan epistemik yang telah terlanjur sebagai panduan pada terapan pembelajaran geografi (Aruyan *et al.*, 2022; Zain *et al.*, 2022). Alih-alih membicarakan bagaimana epistemologi dalam pembelajaran geografi (Ayuran *et al.*, 2022) atau menjelaskan geografi manusia dalam perspektif filsafat ilmu (Zain *et al.*, 2022), mereka malah terjebak melihat isu geografi manusia hanya sebatas aktor-aktor yang bertendensi kepada proyek pembangunan (developmentalisme) atau pembacaan epistemologi yang dangkal sehingga minim pembeda antara riset geografi dan pembelajaran geografi.

Meretas Keterbatasan Ruang Dialogis Geografi Kritis

Dalam rangka meminimalkan keserampangan epistemik yang telah terjadi di dalam pengembangan filsafat geografi di Indonesia, wacana geografi kritis juga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dalam proses pengembangan aspek keilmuan dan implementasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang-ruang wacana yang tidak hanya terbatas kepada penelitian-penelitian internal geografi semata, tetapi juga mulai melibatkan perspektif non-geografi. Meskipun demikian, terdapat tiga sampel penelitian dengan perspektif geografi kritis di Indonesia yang telah cukup memadai sebagai awalan pengembangan konsep geografi kritis secara praktikal.

Pertama, penelitian Nalle (2021) yang dengan cermat menunjukkan bagaimana dimensi geografi kritis dapat diterapkan dalam kajian hukum tata ruang Indonesia. Penelitian tersebut menggabungkan pembacaan filsafat hukum dan proyek interdisiplin dalam penelitian geografi. Nalle (2021) menekankan ada permasalahan yang selama ini terabaikan dalam riset-riset geografi yang cenderung menutup diri pada pendekatan yang lebih filosofis dan kritis. Padahal, berbagai pendekatan baru harus diuji untuk memahami persoalan perkotaan sebagai bagian dari fenomena kekuasaan politik dan ekonomi. Beberapa penjelasan penting tentang produksi ruang sosial serta keadilan spasial menjadi latar belakang yang perlu dijadikan landasan dalam memahami isu komodifikasi ruang, segregasi spasial, dan dominasi ruang oleh pemilik modal yang tentunya berpotensi melahirkan krisis ekologis dan konflik sosial. Namun, belum banyak penelitian tentang hukum tata ruang yang melibatkan perspektif geografi (hukum) kritis secara spesifik, sehingga alih-alih melihat dari sudut pandang kritis tentang ketimpangan relasi ekonomi dan

kekuasaan secara sistemik, justru hanya membatasi persoalan hukum sebatas masalah pelanggaran oleh subjek hukum.

Kedua, karya Hexagraha (2018) yang memosisikan geografi kritis sebagai pisau analisis untuk memahami bentuk-bentuk ko-produksi kota di Indonesia. Riset ini cenderung bernada optimistik untuk merumuskan bagaimana perumusan kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy making* dapat terlaksana sesuai dengan analisis objektif di bidang sains dan teknologi. Namun, kendati demikian, sebagai suatu proses politik, perumusan kebijakan ini selalu terganjal oleh pengaruh kekuasaan yang melingkupinya. Hexagraha (2018) memberikan analisis secara kritis bahwa adanya dimensi deterministik kuat dari segi kekuasaan yang selalu mengabaikan bukti-bukti empiris dari kelompok yang mengalami tindakan diskriminasi daripada menjadikannya sebagai bagian dari proses tindakan afirmatif terhadap kelompok yang representatif. Tidak hanya itu, Hexagraha dan Setyorini (2019) ikut serta memperluas analisis geografi kritis untuk meninjau konsep keadilan spasial serta partisipasi kelompok masyarakat marjinal dalam konteks perencanaan, pengendalian, serta pemanfaatan ruang pada proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Ketiga, Udasmoro *et al.* (2023) memperlihatkan bagaimana strategi untuk memetakan upaya preservasi Bahasa Jawa di Yogyakarta dan Udasmoro & Anwar (2019) menunjukkan bagaimana SIG dapat memetakan isu-isu tentang gender dan kerja-kerja literasi di komunitasnya. Berdasarkan beberapa sampel penelitian implementasi geografi kritis di atas, kita dapat melihat adanya upaya pendekatan lintas kelimuan, sebagaimana ilmu budaya dan ilmu hukum, melihat permasalahan geografi. Mereka meretas keterbatasan pendekatan non-geografis dengan meminjam metode analisis geografi untuk memahami permasalahan ilmiah mereka, begitu juga sebaliknya, tentang peluang komunitas ilmiah geografi yang menilik kajian non-geografis untuk pengembangan metode, kajian, dan implementasi teoretis.

Isu lainnya muncul dari sudut pandang cara mengimplementasi kompleksitas kepentingan dari masing-masing disiplin ilmu, misalnya pembahasan antara alam dan ruang yang sebenarnya perlu melibatkan interaksi intens dengan ilmu sosial humaniora, termasuk memasukkan wacana filsafat di dalamnya. Pentingnya mempertimbangkan wacana filsafat untuk menarik analisis geografi pada jangkar yang lebih luas namun mendalam. Karya klasik Gale & Olsson (1979), *Philosophy in Geography*, menunjukkan potensi geografi sebagai ilmu penengah dari pelbagai isu ilmu alam dan ilmu sosial.

Geografi sebagai ilmu yang cair (*fluid*) lebih berpotensi mengembangkan dimensi keilmuannya. Edward S. Casey (2001) menunjukkan betapa menariknya ketika geograf dan filsuf mampu merefleksikan antara dimensi ruang-tempat (geografis) dan tubuh-j jiwa (filosofis) untuk memahami keterhubungan antara tempat secara geografis dan dunia-kehidupan secara filosofis. Keterhubungan ini akan melahirkan bentuk geografi kritis, yang tujuannya tidak lain ialahnya menjadikan geografi itu sendiri sebagai metode berfilsafat (Cresswell, 2008). Apabila kita mengulik cara pembacaan Michel Foucault (1980) tentang *Questions on Geography*, di mana lanskap fisik tidak terlepas dari sistem semiotik serta apparatus kekuasaan politik (Crampton & Elden, 2016). Geografi kritis menjadi proyek geofilosofi baru untuk mendekonstruksi konsep geografi yang linier: lanskap

lantas tidak dipahami hanya sebatas pada relasi geografisnya tetapi kemudian selalu berdampak pada manusia yang di dalamnya, termasuk doktrin ideologis sampai komunitas ilmiah yang bekerja untuk memahaminya. Kendati demikian, para geograf perlu menanamkan sikap kritis dan emansipator setidaknya pada dirinya sendiri untuk kemudian mewujudkan pengembangan trajektori geografi kritis lanjutan di kemudian hari.

Geograf dan Laku Emansipatoris

Pada bagian terakhir ini, para ahli geografi perlu mulai secara kolektif merumuskan bagaimana seharusnya tindakan praksis atau laku seorang ilmuwan yang memiliki keberpihakan kepada nilai kebenaran yang lebih kritis. Kebenaran di sini bukan hanya berhenti pada objektivitas ilmu, tetapi juga keberpihakan ilmu untuk kemanusiaan. Seorang geograf harus memiliki laku emansipatoris—suatu tindakan yang mengarah pada dimensi-dimensi emansipatoris—yang membebaskan dari belenggu ketimpangan sosial, ketidakadilan spasial, dan represi kekuasaan.

Geografi sebagai studi yang membuat imaji terhadap bumi sebagai tempat tinggal manusia memang sudah sepatutnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari memberikan deskripsi saja. Seperti yang pernah ditulis Strabo dalam karya klasik Geografi (*Geographica*) bahwa orang yang menyibukkan diri dengan deskripsi bumi harus berbicara, tidak hanya tentang fakta-fakta masa kini, tetapi juga terkadang tentang fakta-fakta masa lalu, terutama ketika fakta-fakta itu penting (Strabo, 2014). Dari pernyataannya tersebut, geografi tidak hanya fokus kepada masa kini, tetapi harus mempertimbangkan masa lalu dan masa depan sebagai pembanding untuk menelusuri ‘kebenaran’ atas pola-pola yang terjadi. Keberanian untuk membuat imaji harus dibarengi dengan tanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi ketika imaji tersebut dapat memberikan pemahaman manusia terhadap bumi. Para kapitalis yang memahami bumi sebagai sumber daya tidak terbatas yang dapat memberikan akumulasi keuntungan terus-menerus bagi mereka (Clack & York, 2005; Foster, 2005) tanpa memikirkan akibatnya merupakan sesuatu yang harus ditentang oleh para geograf. Karena, jika para geograf tersebut menelusuri kebenaran terhadap peristiwa tersebut, tentu hasilnya adalah sebuah kesalahan pemahaman terhadap bumi. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin peristiwa yang tidak diinginkan dapat terjadi di masa depan.

Pembahasan yang sama terjadi ketika para geograf tidak melakukan sesuatu terhadap peristiwa-peristiwa sosial yang seharusnya tidak terjadi di masyarakat. Kesalahan pemahaman terhadap ruang sebagai komoditas dapat memberikan ketimpangan akses bagi beberapa masyarakat sehingga situasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dapat terjadi (Nalle & Moeliono, 2023). Geograf sebagai pembuat imaji memiliki tanggung jawab untuk menentang kondisi ini karena tidak sesuai sebagaimana mestinya. Geografi kritis menjadi sebuah jawaban bagi para geograf sebagai sebuah tanggung jawab untuk mengubah kesalahan-kesalahan yang terjadi di bumi serta seisinya. Dengan demikian, para geograf dapat terus mempertanyakan setiap fenomena yang terjadi di alam dan masyarakat. Jika terdapat kesalahan, maka para geograf dapat melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan tersebut.

Selanjutnya, mengapa seorang geograf perlu mengambil sikap kritis dalam laku ilmiahnya? Jawabannya tentu kembali pada pemaknaan apa itu makna ‘kritis’ dalam geografi kritis.

Dalam tradisi filsafat sejarah, istilah 'kritis' tidak hanya menunjuk suatu aliran pemikiran, misalnya ketika kita merujuk kepada 'teori kritis' atau *critical theory* dari mazhab Frankfurt. Sebaliknya, kritis dalam artian Kantian tidak terbedakan dengan gaya berfilsafat, seperti tradisi kontinental atau analitik. Namun, di sisi lain, menurut Ahlskog (2018), kritis artinya mengkritisi kembali konsep dan logika yang telah mapan dalam penyelidikan sejarah. Di sisi lain, Fraser (1985) menjadikan teori kritis sebagai bentuk 'klarifikasi-diri'—konteks 'diri' ialah ilmuwan—dari suatu bentuk perjuangan yang menentang subordinasi kelompok terpinggirkan. Maka, teori kritis bertujuan untuk menjelaskan karakter, corak, dan dasar-dasar yang membentuk pola subordinasi tersebut.

Di sisi lain, alasan kelahiran geografi kritis ialah untuk membantu emansipasi pada bidang geografi yang selama ini dianggap masih terjebak pada orientasi teknokratisasi ilmu, belenggu *status quo* kekuasaan, sampai kepentingan pasar kapitalisme. Proyek laku emansipatoris dapat dimulai dari memetakan permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan oleh bidang geografi, dengan jalan menjadikan geografi sebagai sains yang membebaskan. Setidaknya, dimulai dari dalam diri seorang geograf yang membebaskan dirinya dari berbagai tindakan malpraktik ilmiah: manipulasi data, gratifikasi, sampai korupsi. Seorang geograf harus memiliki integritas ilmiah dan menolak segala praktik manipulatif, contoh manipulasi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan laporan kebijakan yang sangat merugikan banyak pihak. Hal ini menunjukkan, sebagaimana kritik geografi kritis, bahwasanya seorang ilmuwan (geograf) harus mulai turun dari tingginya menara gading institusi ilmiahnya dan mulai beranjak untuk menapak pada persoalan-persoalan akar rumput secara langsung.

Dimensi multidisipliner yang ada dalam geografi menjadikannya sebagai sains yang mampu melakukan investigasi secara menyeluruh sekaligus mendalam. Kita dapat melihat bagaimana geografi bahkan mampu membicarakan praktik-praktik korupsi dalam dunia politik melalui pendekatan geografi kritis. Doshi dan Ranganathan (2019) dengan menggunakan pendekatan geografi kritis mampu memetakan bagaimana praktik korupsi sebagai wacana subjektif yang secara historis berubah-ubah tergantung pada dimensi penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan geografi kritis lantas mengungkapkan bagaimana narasi korupsi dapat dipolitisasi dan diikat dalam bentuk simbolik, material, dan bahkan kekuasaan teritorial. Tidak hanya korupsi politik, geografi kritis hari ini bahkan mampu merefleksikan secara filosofis (onto-epistemologi) tentang masa depan riset-riset kajian kepulauan dan ancaman perubahan iklim akibat aktivitas ekstrem antropogenik (Chandler & Pugh, 2021), bahkan sampai membicarakan geo-filosofi (geografi + filsafat) di masa depan (Keating & Williams, 2022; Savransky, 2023).

Langkah selanjutnya, selain mendukung semangat progresivitas di bidang geografi di Indonesia, maka perlu adanya ketegasan sekaligus keterbukaan dari bidang geografi itu sendiri. Ketegasan ini, artinya memihak pada kepentingan publik yang emansipatif daripada sekadar mendukung *status quo* kepentingan kelompok penguasa atau pemilik modal tertentu. Geografi perspektif kritis artinya tidak menjadikan geografi sebagai disiplin yang inferior apalagi hierarkis. Geografi bukan di bawah geologi atau di atas sosial humaniora; geografi ada di antaranya. Ketika mentalitas inferior ini terlalu mendominasi dalam cara berpikir serta kerja-kerja ilmiah geograf, tujuan untuk menjadikan geografi sebagai laku

emansipatoris gagal. Alih-alih mengkritik dunia, mereka justru terjebak dalam dimensi-dimensi non-ilmiah, seperti politik ilmu secara institusional. Kritik ini juga berlaku untuk disiplin lainnya yang selalu berusaha membangun tembok-tembok imajiner, untuk saling membatasi interaksi lintas disiplin dan mendominasi pada satu klaim saintifik. Ironisnya, bentuk feodalistik dalam dunia ilmiah ini menjadikan sains sebagai bentuk subordinasi dalam politisasi sains sehingga sangat kontraproduktif dalam mencapai tujuan ilmiah bersama.

Setelah menelusuri lebih jauh, kita juga perlu memahami bahwa kajian geografi kritis di Indonesia sedang mengalami kemacetan epistemik. Hal ini disebabkan karena adanya kesan negatif yang melekat pada teori-teori kritis, yang dianggap sebagai turunan dari teori Marxisme atau dianggap terlalu 'sosial' dan 'dangkal'. Sangat naif jika seorang geograf terjebak dalam dogma dualisme ilmu. Justru sebaliknya, geografi adalah jembatan antara kepentingan dua dan bahkan banyak disiplin, terutama ilmu kealaman dan ilmu sosial humaniora. Geografi pada umumnya selalu dibagi menjadi dua domain, antara geografi manusia dan geografi fisik, padahal kerja-kerja geograf justru menghubungkan dua kapasitas kelimuan yang unik, yaitu membaca relik-relik historis bahkan mampu membaca retorika dalam gerak kompleksitas realitas.

Saat ini, geografi kontemporer justru dihadapkan dengan proyek interdisipliner-multidisipliner, dan mulai membicarakan tentang geografi masa depan, misalnya tentang masa depan geografi lingkungan. Masalah lingkungan menjadi kepentingan kolektif: geograf tidak boleh merasa puas ketika membaca lanskap lingkungan sebagaimana adanya, melainkan perlu memahami bagaimana hasil dari hubungan kekuasaan yang tidak setara terjadi, pengaruh kolonialisme, kapitalisasi ruang dan lahan, bahkan sampai ketimpangan kelompok marjinal yang juga tidak terlepas dari pengaruh hidrologi, ekologi, serta perubahan iklim. Menurut Chen *et al.* (2022) geografi akan terus menerus berkembang tidak dalam bentuk internal institusional (geografi untuk geografi), melainkan memiliki hubungan yang sangat dinamis dengan bidang-bidang lain, dan para ahli geografi seharusnya terus menunjukkan bentuk integritas kepemimpinan dalam hal interdisipliner. Sebagai catatan, arti kepemimpinan (*leadership*) di sini bukan berarti mendominasi atau melanggengkan kultur hierarkis-feodalis, melainkan geografi perlu mulai merangkul berbagai perspektif, mendukung pengaturan kelembagaan institusional yang mendorong aktivitas interdisipliner, serta berkontribusi kepada pengembangan perspektif, pendekatan, serta wawasan geografis secara kolektif.

Dapat disimpulkan, laku emansipatoris geograf juga mendapatkan tanggung jawab intelektual untuk berani mengambil sikap, terutama dalam bidang 'geografi manusia' yang sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial humaniora. Padahal, membaca geografi kritis adalah bentuk integrasi dalam empat peta domain geografi (sosial humaniora, fisik, teknik, dan kehidupan). Domain sosial humaniora hanya berhenti pada riset-riset kartografi, ekologi sosial dan industrial, populasi, urbanisasi, perkotaan, tata kelola perencanaan, mobilitas, geografi sosial, ekonomi, dan perdagangan. Begitu juga dengan domain fisik dan teknik, yang menjadikan geografi dekat dengan ilmu kebumihuan, berbicara tentang iklim, geografi fisik, observasi, pengindraan jauh, hidrologi, meteorologi, dan sebagainya. Sedangkan pada domain kehidupan sangat dekat dengan bidang biologi evolusioner yang melahirkan biogeografi (Guilbert, 2021; Lomolino, 2020). Hal tersebut sebenarnya telah menunjukkan

bahwa geografi telah bergerak dari ruang multidisipliner ke transdisipliner. Sayangnya, geografi kritis masih mendapatkan penolakan di kalangan ilmuwan entah karena adanya sentimen tertentu atau masalah kelembagaan tertentu, padahal proyeksi transdisipliner ini menjadi petanda: bagaimana palingan spasial (*spatial turn*) (Goonewardena, 2022) dalam berbagai domain geografi dapat menjadi tawaran alternatif ketika memahami pluralitas dunia-kehidupan (*life-world*) (Mahaswa & Purbandani, 2023). Lantas, posisi geografi kritis ialah memberikan perlawanan atas sekat-sekat spesialisasi yang terbayang selama ini, yakni pembatasan dualisme arbitrer yang berlawanan dengan kompleksitas permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Dengan demikian, geografi kritis yang bertujuan untuk mengembangkan studi geografi dalam ranah teoretis dan praktis sebagai bentuk memperjuangkan perubahan sosial yang lebih berkeadilan, untuk saat ini, belum tercapai sebab rendahnya minat implementasi metode analisis kritis di kalangan disiplin geografi (di) Indonesia itu sendiri.

KESIMPULAN

Kondisi komunitas ilmiah geografi dewasa ini, secara spesifik di Indonesia, masih mengalienasi wacana geografi kritis dalam nomenklatur penelitian dan pendidikan geografi. Penolakan terhadap geografi kritis terjadi akibat keserampangan epistemik dalam mendefinisikan filsafat geografi yang terkesan terbatas dan terburu-buru. Alih-alih mendapatkan wacana yang lebih kritis tentang perkembangan filsafat geografi, justru penelitian filsafat geografi di Indonesia masih terjebak pada jalan memutar yang mengulang-ulang kesalahan penerjemahan tentang makna triadik (ontologi, epistemologi, dan aksiologi). Kendati demikian, artikel ini menghadirkan tawaran untuk merefleksikan ulang makna di balik ‘kritis’ dari geografi kritis itu sendiri. Kritis bermakna melampaui wacana yang mapan, mendekonstruksi konsep lama untuk mengembangkan konsep baru yang lebih kontekstual, serta menegaskan bentuk keterbukaan inklusivitas geografi sebagai jembatan lintas disiplin. Tidak hanya itu, implementasi makna kritis juga disematkan bagi seorang geograf untuk melakukan palingan epistemik. Geograf kritis tidak hanya diam diri di atas menara gading keilmuannya, melainkan mulai berani menapak pada ranah akar rumput untuk mengaktualisasikan laku emansipatoris. Laku emansipatoris seorang geograf kritis merupakan inti untuk menjadikan disiplin geografi, baik secara teoretis dan praksis, memiliki keberpihakan terhadap perjuangan perubahan sosial yang lebih berkeadilan. Urgensi ini muncul ketika saat ini kita dihadapkan dengan pelbagai masalah yang melanda, mulai dari kerusakan ekologi global, perubahan iklim, ketidakadilan iklim lintas generasi, hingga ketimpangan ekonomi global yang disebabkan oleh lemahnya fungsi kritik dalam disiplin geografi itu sendiri. Oleh karena itu, adalah sebuah panggilan untuk para geograf di Indonesia: bersatulah, untuk dunia yang layak diperjuangkan!

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan bagian dari Hibah Program Peningkatan *Academic Excellence* skema C Universitas Gadjah Mada dengan No. [6530/UN1.P1/PT.01.03/2024]. Selain itu kami juga berterima kasih kepada Siti Murtiningsih dan Ari Bagus Panuntun selama proses diskusi dalam penyempurnaan artikel penelitian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis Pertama mendesain kerangka penelitian, menyintesis data, membuat dan menyunting naskah publikasi; **Penulis Kedua** mendesain metode penelitian dan melakukan analisis data; dan **Penulis Ketiga** mengumpulkan rujukan data

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlskog, J. (2018). The idea of a philosophy of history. *Rethinking History*, 22(1), 86–104. <https://doi.org/10.1080/13642529.2017.1422305>
- Aitken, S. C., & Valentine, G. (Eds.). (2006). *Approaches to human geography* (Online-Ausg). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781446215432>
- Aksa, F. I., Utaya, S., & Bachri, S. (2019). Geografi dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Majalah Geografi Indonesia*, 33(1), 43. <https://doi.org/10.22146/mgi.35682>
- Aruyan, S., Zid, M., & Sya, A. (2022). Epistemologi dalam Pembelajaran Geografi. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 139–144.
- Barnes, T. J., & Sheppard, E. S. (Eds.). (2019). *Spatial histories of radical geography: North America and beyond*. Wiley.
- Barnett, C. (2006). Postcolonialism: Space, textuality, and power. In S. C. Aitken & G. Valentine (Eds.), *Approaches to human geography* (Online-Ausg, pp. 147–159). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781446215432>
- Bauman, Z. (1998). *Globalization: The human consequences* (Repr.). Columbia University Press.
- Bennett, L., & Layard, A. (2015). Legal Geography: Becoming Spatial Detectives. *Geography Compass*, 9(7), 406–422. <https://doi.org/10.1111/gec3.12209>
- Berg, L. D., Best, U., Gilmartin, M., & Larsen, H. G. (2022). *Placing Critical Geographies: Historical Geographies of Critical Geography* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315600635>
- Billo, E. (2022). Institutional ethnography: A feminist methodological approach to studying institutions of resource governance. In M. Himley, E. Havice, & G. Valdivia (Eds.), *The Routledge handbook of critical resource geography* (pp. 215–224). Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780429434136>
- Blomley, N. (2006). Uncritical critical geography? *Progress in Human Geography*, 30(1), 87–94. <https://doi.org/10.1191/0309132506ph593pr>
- Blomley, N. (2008). The spaces of critical geography. *Progress in Human Geography*, 32(2), 285–293. <https://doi.org/10.1177/0309132507084401>
- Bryan, J. (2009). Where would we be without them? Knowledge, space and power in indigenous politics. *Futures*, 41(1), 24–32. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2008.07.005>
- Bryan, J. (2022). Mapping resources: Mapping as method for critical resource geographies. In M. Himley, E. Havice, & G. Valdivia (Eds.), *The Routledge handbook of critical resource geography* (pp. 441–452). Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780429434136>
- Cameron, E. (2012). New geographies of story and storytelling. *Progress in Human Geography*, 36(5), 573–592. <https://doi.org/10.1177/0309132511435000>
- Casey, E. S. (2001). Between Geography and Philosophy: What Does It Mean to Be in the Place-World? *Annals of the Association of American Geographers*, 91(4), 683–693. <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00266>
- Castells, M. (1989). *The informational city: Information technology, economic restructuring, and the urban-regional process* (Reprinted). Blackwell.
- Castree, N., & Gregory, D. J. (2006). *David Harvey: A critical reader*. Blackwell publi.

- Chandler, D., & Pugh, J. (2021). Anthropocene islands: There are only islands after the end of the world. *Dialogues in Human Geography*, 11(3), 395–415. <https://doi.org/10.1177/2043820621997018>
- Chen, R., Zhu, A., Li, Y., Li, P., Ye, C., & Meadows, M. E. (2022). Interactions of Geography with Other Natural and Social Sciences and the Humanities. In *A Geographical Century: Essays for the Centenary of the International Geographical Union* (pp. 181–198). Springer.
- Chigbu, U. E., Atiku, S. O., & Du Plessis, C. C. (2023). The Science of Literature Reviews: Searching, Identifying, Selecting, and Synthesising. *Publications*, 11(1), 2. <https://doi.org/10.3390/publications11010002>
- Clack, B., & York, R. (2005). Carbon Metabolism: Global Capitalism, Climate Change, and the Biospheric Rift. *Theory and Society*, 34(4), 391–428. JSTOR.
- Crampton, J. W., & Elden, S. (Eds.). (2016). *Space, knowledge and power: Foucault and geography*. Routledge.
- Cresswell, T. (2008). Place: Encountering geography as philosophy. *Geography*, 93(3), 132–139. <https://doi.org/10.1080/00167487.2008.12094234>
- Cresswell, T. (2013). *Geographic thought: A critical introduction*. Wiley-Blackwell.
- Daly, C. (2010). *An introduction to philosophical methods*. Broadview press.
- Dawadi, S. (2020). Thematic Analysis Approach: A Step by Step Guide for ELT Research Practitioners. *Journal of NELTA*, 25(1–2), 62–71. <https://doi.org/10.3126/nelta.v25i1-2.49731>
- Devine, J., & Ojeda, D. (2017). Violence and dispossession in tourism development: A critical geographical approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(5), 605–617. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1293401>
- Dolan, A. M. (2016). Place-based curriculum making: Devising a synthesis between primary geography and outdoor learning. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 16(1), 49–62. <https://doi.org/10.1080/14729679.2015.1051563>
- Donkoh, S., & Mensah, J. (2023). Application of triangulation in qualitative research. *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, 10(1), 6–9. <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- Donovan, A. (2017). Geopower: Reflections on the critical geography of disasters. *Progress in Human Geography*, 41(1), 44–67. <https://doi.org/10.1177/0309132515627020>
- Doshi, S., & Ranganathan, M. (2019). Towards a critical geography of corruption and power in late capitalism. *Progress in Human Geography*, 43(3), 436–457. <https://doi.org/10.1177/0309132517753070>
- Ellermann, A. (2024). Reading closely. In J. Cyr & S. W. Goodman (Eds.), *Doing good qualitative research* (pp. 339–348). Oxford University Press.
- Flick, U. (2014). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781446282243>
- Foster, J. B. (2005). The Treadmill of Accumulation: Schnaiberg's Environment and Marxian Political Economy. *Organization & Environment*, 18(1), 7–18. <https://doi.org/10.1177/1086026604270442>
- Foucault, M. (1980). Questions on geography. In *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (pp. 63–77). Pantheon.
- Fraser, N. (1985). What's Critical about Critical Theory? The Case of Habermas and Gender. *New German Critique*, 35, 97. <https://doi.org/10.2307/488202>
- Fuchs, T. T. (2023). A framework for climate change education in critical geography. *Geography*, 108(2), 95–100. <https://doi.org/10.1080/00167487.2023.2217632>
- Gale, S., & Olsson, G. (Eds.). (1979). *Philosophy in Geography*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-9394-5>
- Gaudelli, W., & Patterson, T. (2012). "It's Just Geography": Critical Geography and a Critique of Advanced Placement Human Geography. In T. W. Kenreich (Ed.), *Geography and Social Justice in the Classroom* (pp. 114–128). Routledge.
- Giddens, A. (1981). Time and space in social theory. In J. Matthes (Ed.), *Lebenswelt und soziale Probleme: Verhandlungen des 20. Deutschen Soziologentages zu Bremen 1980* (pp. 88–97). Campus Verl.
- Goonewardena, K. (2022). Space. In B. Skeggs, S. R. Farris, A. Toscano, & S. Bromberg (Eds.), *The Sage handbook of marxism. Volume 1-3* (pp. 507–526). Sage.
- Gregory, D. (1998). *Geographical imaginations* (Reprinted). Blackwell.
- Gregory, D., & Castree, N. (Eds.). (2012). *Human geography*. SAGE Publications.
- Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M., & Whatmore, S. (2011). *The Dictionary of Human Geography*. John Wiley & Sons.
- Guilbert, E. (Ed.). (2021). *Biogeography: An integrative approach of the evolution of living*. ISTE Ltd / John Wiley and Sons Inc.
- Hall, S. (2011). Introduction: Who needs 'identity'? In S. Hall & P. Du Gay (Eds.), *Questions of cultural identity* (pp. 1–17). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446221907.n1>
- Harvey, D. (1969). *Explanation in geography*. Hodder Arnold.
- Harvey, D. (1972). Revolutionary and Counter Revolutionary Theory in Geography and The Problem of Ghetto Formation. *Antipode*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1972.tb00486.x>
- Harvey, D. (Ed.). (1973). *Social justice and the city*. University of Georgia Press.
- Harvey, D. (1996). *Justice, nature, and the geography of difference*. Blackwell Publishers.
- Harvey, D. (2001). *Spaces of capital: Towards a critical geography*. Routledge.
- Harvey, D. (2009). *Social justice and the city* (Rev. ed). University of Georgia Press.
- Harvey, D. (2018). *The limits to capital*. Verso.
- Harvey, D. (2019a). *Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution*. Verso.
- Harvey, D. (2019b). *Spaces of global capitalism*. Verso.
- Hastuti, H. (2007). Ada Apa Dengan Geografi Manusia? *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/gm.v5i2.14064>
- Hastuti, H. (2009). Perspektif spasial dalam kajian geografi manusia. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/gm.v7i2.19087>
- Hexagraha, S. A. A. (2018). Trajektori Ko-Produksi Kota di Indonesia: Telaah Geografi Kritis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 88–116.
- Hexagraha, S. A. A., & Setyorini, S. N. (2019). Tinjauan terhadap konsep keadilan spasial dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada program normalisasi Ciliwung di provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 349. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2008>
- Hiemstra, N., & Billo, E. (2017). Introduction to Focus Section: Feminist Research and Knowledge Production in Geography. *The Professional Geographer*, 69(2), 284–290. <https://doi.org/10.1080/00330124.2016.1208103>
- Hubbard, P., Bartley, B., Fuller, D., & Kitchin, R. (2002). *Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography*. A&C Black.
- Huber, M. (2019). Geography. In J. Diamanti, A. Pendakis, & I. Szeman (Eds.), *The Bloomsbury companion to Marx* (pp. 557–561). Bloomsbury Academic.
- Ikhsan, F. A., Utaya, S., Bachri, S., Sugiarto, A., & Sejati, A. E. (2024). Paradigma Filsafat Geografi Kontemporer: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Keterampilan Sainstik. *Majalah Geografi Indonesia*, 38(1). <https://doi.org/10.22146/mgi.85222>

- Jameson, F. (1991). *Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1515/9780822378419>
- Keating, T. P., & Williams, N. (2022). Geophilosophies: Towards another sense of the earth. *Subjectivity*, 15(3), 93–108. <https://doi.org/10.1057/s41286-022-00138-3>
- Kuhn, T. S. (2012). *The structure of scientific revolutions* (4th ed). University of Chicago press.
- Kulczak-Dawkins, R. P., Piroozfar, P. A., & Harder, M. K. (2018). A grounded thematic narrative literature review method. *Building Meaningful Futures*. <https://buildingmeaningfulfutures.org/wp-content/uploads/2024/05/kulczak-dawkins-et-al-2018a-meth1-v2.3-gtn-lit-review-method.pdf>
- Lasaiba, M. A. (2023). Geografi Manusia Dalam Konteks Perspektif Spasial. *GEOFORUM Jurnal Geografi Dan Pendidikan Geografi*, 81–99.
- Lefebvre, H. (2013). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.; 33. print). Blackwell Publishing.
- Lefebvre, H. (2014). *Critique of Everyday Life: The one-volume edition* (One-vol. ed). Verso.
- Lomolino, M. V. (2020). *Biogeography: A Very Short Introduction* (New product). Oxford University Press.
- Lovell, S., Coen, S., & Rosenberg, M. W. (Eds.). (2023). *The Routledge handbook of methodologies in human geography*. Routledge, Taylor & francis Group.
- Mahaswa, R. K. (2016). Dari Kritik Positivisme Menuju Penalaran Metadisipliner. *Cogito: Jurnal Mahasiswa Filsafat*, 3(2), 185–193.
- Mahaswa, R. K., & Purbandani, A. M. (2023). The pluriverse of the Anthropocene: One Earth, many worlds. *Catalan Journal of Communication & Cultural Studies*, 15(2), 269–284. https://doi.org/10.1386/cjcs_00091_1
- Mercier, M. E., & Norton, W. (2019). *Human geography* (Tenth edition). Oxford University Press.
- Morrill, R. (1969). Geography and The Transformation of Society. *Antipode*, 1(1), 6–9. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1969.tb00385.x>
- Mwita, K. (2022). Factors to consider when choosing data collection methods. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(5), 532–538. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1842>
- Najib, K. (2024). Critical Muslim geographies through a critical geography of Islamophobia. *Dialogues in Human Geography*, 20438206241262512. <https://doi.org/10.1177/20438206241262512>
- Nalle, V. I. W. (2021). Pendekatan geografi hukum kritis dalam kajian hukum tata ruang Indonesia: Sebuah wacana filsafat hukum dan interdisiplin. *Justitia et Pax*, 37(1).
- Nalle, V. I. W., & Moeliono, T. P. (2023). Spatial injustice in the context of cemeteries: The case of Surabaya, Indonesia. *Land Use Policy*, 131, 106751. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106751>
- Ozias, M., & Pasque, P. (2019). Critical Geography as Theory and Praxis: The Community–University Imperative for Social Change. *The Journal of Higher Education*, 90(1), 85–110. <https://doi.org/10.1080/00221546.2018.1449082>
- Peet, J. R. (1969). A New Left Geography. *Antipode*, 1(1), 3–5. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1969.tb00384.x>
- Peet, R. (1998). *Modern geographical thought*. Blackwell Publishers.
- Poespowardojo, T. S., & Seran, A. (2015). Filsafat Ilmu Pengetahuan Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik terhadap Visi Positivisme Logis, serta Implikasinya. *Jakarta: PT Kompas Media Nusantara*.
- Savransky, M. (2023). Passages to the outside: A prelude to a geophilosophy of the future. *Dialogues in Human Geography*, 20438206231151426.
- Schlosser, K. (2022). Knowing the storyteller: Geohumanities and critical resource geography. In M. Himley, E. Havice, & G. Valdivia (Eds.), *The Routledge handbook of critical resource geography* (pp. 34–42). Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780429434136>
- Schmid, C. (2022). *Henri Lefebvre and the theory of the production of space*. Verso.
- Schmid, J. (2022). *The methods of metaphilosophy: Kant, Maimon, and Schelling on how to philosophize about philosophy* (Vol. 11). Klostermann. <https://doi.org/10.5771/9783465145981>
- Schryen, G. (2015). Writing Qualitative IS Literature Reviews— Guidelines for Synthesis, Interpretation, and Guidance of Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 37. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03712>
- Sejati, A. E., Sugiarto, A., Anasi, P. T., Utaya, S., & Bachri, S. (2022). Tantangan filsafat geografi dalam perkembangan geografi terkini: Kajian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 126. <https://doi.org/10.22146/mgi.74942>
- Sennett, R. (1994). *Flesh and stone: The body and the city in Western civilization* (1st ed). W.W. Norton.
- Shan, Y. (Ed.). (2024). *Rethinking Thomas Kuhn's Legacy*. Springer.
- Simpson, L. B. (2017). *As we have always done: Indigenous freedom through radical resistance*. University of Minnesota Press.
- Smith, N. (1984). *Uneven development: Nature, capital, and the production of space*. University of Georgia Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Strabo. (2014). *The Geography of Strabo* (D. W. Roller, Trans.). Cambridge University Press.
- Strauss, K. (2015). These Overheating Worlds. *Annals of the Association of American Geographers*, 105(2), 342–350. <https://doi.org/10.1080/00045608.2014.973805>
- Taher, A. (2017). Babak Baru Metode Penelitian Geografi Manusia. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 11(1), 1–22.
- Tornaghi, C. (2014). Critical geography of urban agriculture. *Progress in Human Geography*, 38(4), 551–567. <https://doi.org/10.1177/0309132513512542>
- Udasmoro, W., & Anwar, S. (2019). Contesting the Social Spaces: Gender Relations of Literary Communities in Yogyakarta and Surakarta. *Indonesian Journal of Geography*, 51(3), 346. <https://doi.org/10.22146/ijg.44165>
- Udasmoro, W., Yuwono, J. S. E., Sulistyowati, S., Firmonasari, A., Astuti, W. T., & Baskoro, B. R. S. (2023). The Preservation of the Javanese Language in the Special Region of Yogyakarta. *Indonesian Journal of Geography*, 55(1), 59. <https://doi.org/10.22146/ijg.68183>
- Uhlenwinkel, A., Béneker, T., Bladh, G., Tani, S., & Lambert, D. (2017). GeoCapabilities and curriculum leadership: Balancing the priorities of aim-based and knowledge-led curriculum thinking in schools. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 26(4), 327–341. <https://doi.org/10.1080/10382046.2016.1262603>
- Woodward, K., Dixon, D. P., & Jones, J. P. (2009). Poststructuralism/ Poststructuralist Geographies. In *International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 396–407). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00727-6>
- Zain, I. M., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2022). Geografi Manusia dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(4). <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i4.4094>
- Zaragocin, S., & Caretta, M. A. (2021). *Cuerpo-Territorio: A Decolonial Feminist Geographical Method for the Study of Embodiment*. *Annals of the American Association of Geographers*, 111(5), 1503–1518. <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1812370>